

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan yang mana kekuasaan politik dan pengambilan keputusan berada di tangan warga negara. Prinsip dasar dari demokrasi adalah bahwa rakyat memiliki hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri, baik melalui pemilihan umum atau partisipasi langsung dalam proses keputusan. Banyak negara di Barat maupun Asia menggunakan sistem demokrasi sebagai salah satu tolak ukur dalam membangun kerja sama dengan negara lainnya. Prinsip-prinsip demokrasi, seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan pemilihan umum yang adil, sering menjadi faktor penting dalam menjalin hubungan bilateral dan multilateral. Negara-negara demokratis cenderung memiliki nilai-nilai bersama terkait demokrasi dan tatanan dunia berdasarkan aturan hukum. Selain itu, organisasi internasional seperti ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) juga memiliki hubungan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Prinsip dasar ASEAN dituangkan dalam Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (TAC). Yang pertama adalah gagasan rasa hormat antar anggota. Poin kedua terkait dengan kebebasan setiap negara anggota untuk memutuskan bagaimana menjalankan urusannya sendiri tanpa pengaruh luar. Ketiga, mengacu pada kebijakan ASEAN yang tidak mencampuri urusan dalam negara anggotanya. Keempat, membantu permasalahan dan perbedaan masing-masing negara anggota diselesaikan secara damai¹. ASEAN memiliki beberapa program yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar demokrasi, ASEAN berusaha untuk memajukan proses demokratisasi di tatanan regional dan global. Diantaranya seperti *United Nations Human Rights Council (UNHRC)*, *Sustainable Development Goals (SDGs) 2030*, *ASEAN Political-Security Community Blueprint*.

¹ *The Founding ASEAN*. <https://asean.org/the-founding-of-asean/>

Pengembangan dinamika demokrasi yang terjadi di suatu negara merupakan urusan dalam negeri tersebut, tetapi fenomena hubungan internasional di era globalisasi seperti hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi adalah bagian dari isu internasional². Namun, perlu diketahui bahwa banyak negara di seluruh dunia masih belum berhasil menerapkan sistem demokrasi sepenuhnya, termasuk Myanmar. Burma atau yang dikenal saat ini dengan Myanmar mengalami pemerintahan demokrasi sejak kemerdekaan Myanmar di tahun 1948-1958 dan di tahun 1960, sehingga selain dekade tersebut pemerintahan Myanmar dikuasai oleh kekuatan militer. Pada tahun 1948 di bawah pemerintahan U Nu, mencoba menerapkan pemerintahan yang demokratis dengan menggunakan sistem parlementer namun sebagaimana negara yang baru merdeka, pemerintahan U Nu menghadapi keadaan sosio-politik yang rumit. Keterlibatan kubu militer dimulai saat Jenderal Ne Win ditugaskan untuk mengendalikan persiapan dan berlangsungnya pemilu di tahun 1960. Militer berhasil memulihkan keadaan sampai terselenggaranya pemilu tahun 1960 yang dimenangkan oleh partai U Nu yaitu *Union Party*. Keberhasilan militer yang dipimpin oleh PM U Nu pada tahun 1962 bisa di katakan sebagai awal mula keruntuhan sistem demokrasi di Myanmar. Selama pemerintahan di kuasai oleh Ne Win hanya terdapat satu partai yang di akui, yaitu *Burmese Socialist Program Party (BSPP)* yang isi anggotanya di dominasi oleh militer dan menjadi pilar terdepan dari partai. Pada Bulan Juli 1971, Junta militer mengumumkan untuk menyusun konstitusi baru dan mengadakan pemilihan umum dan berjanji akan dialihkan ke pemerintahan sipil setelah pemilihan umum. Pada tahun 1974 telah diadakan pemilihan umum pertama sesuai dengan konstitusi berlaku dan pemerintahan militer Ne Win. Pada tahun tersebut merupakan akhir dari pemerintahan demokratis dan awal fase kediktatoran konstitusional militer.

² Fernando Eugenio R, Burhan Niode, Trilke Erita T. (2022). Dinamika Kehidupan Demokrasi Di Myanmar (Suatu Studi Tentang Pengalihan Kekuasaan Oleh Militer Di Tahun 2021). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* Vol.7 No.2. 37-38.

Kudeta Kembali terjadi pada tanggal 1 Februari tahun 2021. Myanmar mengalami kudeta yang dilakukan oleh militer untuk yang kesekian kalinya. Kudeta yang dilakukan oleh militer ini dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing. Kudeta ini dilakukan di Ibu Kota Myanmar yaitu di kota Naypyidaw dengan melengserkan kekuasaan sah dari pimpinan sah Myanmar yaitu Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi merupakan pemimpin sah dari Myanmar dengan memenangkan pemilu pada November 2020. Kudeta tersebut disebabkan oleh pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2020. Myanmar mengadakan Pemilu demokratis kedua, pemilu yang diselenggarakan tersebut dimenangkan oleh partai *National League for Democracy* (NLD) yang mendapatkan 83% hasil pemilu, kemenangan mutlak tersebut dibantah oleh pihak militer. Militer menyatakan bahwa kemenangan NLD merupakan kecurangan³. Keputusan yang telah ditetapkan tersebut diperoleh melalui rapat Komisi Pemilihan Umum yang baru saja dibentuk saat itu oleh militer, Komisi Pemilihan Umum yang baru dibentuk bersamaan dengan pembubaran kepengurusan Komisi Pemilihan Umum yang lama. Setelah pihak militer menyatakan kecurangan dari hasil pemilu sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum yang baru menjanjikan dilaksanakan ulang proses pemilihan umum yang bebas dan adil sesuai dengan konstitusi yang berlaku, bersamaan dengan hal tersebut militer juga mengambil tindakan dengan memberikan penetapan status darurat nasional dalam waktu satu tahun, yang berakhir pada kudeta militer pada Februari 2021 lalu. Kekuatan Militer Myanmar (Tatmadaw) yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing telah melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil dibawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, serta anggota politikus dari partai yang berkuasa.

Pada 24 Mei 2021, Aung San Suu Kyi muncul di hadapan pengadilan untuk pertama kalinya sejak penahanannya dalam kudeta. Saat tampil di pengadilan, dia tampak bertekad untuk mendukung para pendukung demokrasi dan mempertahankan prinsip-prinsip partainya. Aung San Suu Kyi menyatakan keyakinannya bahwa partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), akan

³ Garmabar, P. (2021). Respon Dunia Terhadap Kudeta Militer Myanmar. *Review of International Relations*

tetap ada selama orang-orang Myanmar masih berjuang untuk demokrasi. Penampilan Aung San Suu Kyi di pengadilan memperoleh perhatian internasional yang besar, dan dia menjadi simbol perlawanan terhadap kudeta militer. Meskipun menghadapi berbagai tuduhan yang diajukan oleh pemerintah militer, termasuk tuduhan kriminal yang diragukan keabsahannya, Aung San Suu Kyi tetap teguh dalam komitmennya untuk melanjutkan perjuangan untuk demokrasi di Myanmar. Kehadiran dan pernyataannya di pengadilan menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan perjuangan demokrasi di Myanmar dan memotivasi para pendukung demokrasi di seluruh negeri untuk terus berjuang meskipun tantangan yang dihadapi.

Setelah kudeta terjadi, banyak peraturan yang diberlakukan militer Myanmar seperti adanya jam malam, pemutusan jaringan internet dan adanya pembatasan dalam kerumunan serta adanya kendaraan berlapis baja yang dikerahkan.⁴ Kudeta yang dilakukan militer membuat beberapa kalangan masyarakat Myanmar tidak terima, terutama para aktivis pendukung partai NLD atau pendukung demokrasi. Terlebih lagi adanya peraturan pasca kudeta yang diberlakukan untuk menekan masyarakat. Kebijakan tersebut memicu keresahan dan kemarahan masyarakat sipil yang mayoritas pro terhadap pemerintahan demokratis. Masyarakat sipil mengeskpresikan bentuk kemarahannya dalam demonstrasi besar-besaran, kritik dalam tulisan-tulisan, dan meminta bantuan masyarakat internasional melalui lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan yang relevan seperti Amnesty International, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) dan sebagainya. Rezim junta militer tidak tinggal diam dengan melakukan perlawanan seperti penangkapan dan bahkan pembunuhan terhadap pendukung kubu pemerintahan demokratis. Berdasarkan laporan dari Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) per tanggal 16 Mei 2022, Kudeta Militer Myanmar, Februari 2021 telah berkontribusi terhadap tewasnya 1.848 korban jiwa dan penahanan 10.685 orang.

Kondisi tersebut menciptakan situasi yang sangat tegang di Myanmar. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi oleh aktivis dan pendukung

⁴ Roza, R. (2021). Kudeta Militer di Myanmar: Ujian Bagi ASEAN. *Journal of Info Singkat*. XII(4), 7-12.

demokrasi, mereka terus berjuang untuk mengembalikan pemerintahan sipil dan mengakhiri kekuasaan militer yang otoriter. Demonstrasi besar-besaran terus berlangsung di berbagai kota di seluruh Myanmar, di mana para demonstran menuntut pembebasan tahanan politik, pemulihan demokrasi, dan pengembalian kebebasan sipil. Selain itu, upaya diplomasi internasional juga berperan penting dalam penyelesaian krisis ini. Berbagai lembaga dan negara-negara di seluruh dunia telah mengutuk kudeta Myanmar dan memberikan dukungan kepada gerakan demokrasi di negara tersebut. *Amnesty International*, OHCHR, dan organisasi internasional lainnya terus memantau situasi hak asasi manusia di Myanmar dan mencoba memfasilitasi dialog antara pemerintah militer dan kelompok pro-demokrasi. Namun, rezim junta militer tetap keras dalam menindak lawan-lawannya. Penangkapan dan pembunuhan terus berlanjut, mengakibatkan banyak korban jiwa dan penderitaan bagi keluarga mereka. Upaya internasional untuk mengatasi krisis ini masih terus berlanjut, sambil berharap agar situasi di Myanmar dapat berubah menuju pemulihan demokrasi dan perdamaian.

Kudeta di Myanmar telah memicu desakan terhadap ASEAN untuk berperan lebih aktif. Brunei Darussalam sebagai ketua ASEAN, meminta Myanmar mengupayakan dialog, rekonsiliasi dan normalisasi. Dengan merujuk Piagam ASEAN, Brunei meminta Myanmar mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, dan mengingatkan bahwa stabilitas politik di ASEAN sangat penting untuk mencapai Komunitas ASEAN yang damai, stabil, dan sejahtera.⁵ Selain itu juga keinginan negara anggota ASEAN yang memberikan bantuan kepada masyarakat Myanmar yang mengalami krisis kemanusiaan dan ekonomi. Namun, upaya ASEAN dalam menangani krisis di Myanmar tidaklah tanpa kontroversi. Sebagian kritikus berpendapat bahwa tanggapan ASEAN terhadap kudeta tersebut belum memadai, dan ada desakan untuk tindakan yang lebih keras terhadap pemerintah militer Myanmar. Beberapa pihak juga meragukan efektivitas dialog dengan militer

⁵ Willi Ashadi. (2022). Kudeta Junta Militer Myanmar Terhadap Aung San Suu Kyi 2021. *Journal of Islamic and International Affairs*. Vol. 7 No. 2. 121.

Myanmar, mengingat terus berlanjutnya tindakan keras terhadap demonstran dan kelompok pro-demokrasi.

Pertemuan antara pemimpin ASEAN dan perwakilan militer Myanmar telah menghasilkan beberapa kebijakan, seperti perjanjian untuk menghentikan kekerasan dan memulai dialog nasional. Namun, pelaksanaan perjanjian tersebut masih menjadi tantangan besar, dan kekerasan terus berlanjut di Myanmar. Selain upaya diplomatik, negara-negara anggota ASEAN juga menyuarakan keinginan untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan ekonomi kepada masyarakat Myanmar yang terkena dampak krisis. Ini mencakup bantuan dalam bentuk bahan makanan, perawatan medis, dan dukungan ekonomi untuk membantu mengurangi penderitaan yang dialami oleh warga Myanmar. Krisis di Myanmar tetap menjadi isu penting dalam diplomasi regional di Asia Tenggara, dan ASEAN terus berusaha untuk mencari solusi yang dapat membawa perdamaian, stabilitas, dan pemulihan demokrasi ke negara tersebut. Namun, tantangan yang dihadapi dalam menyelesaikan krisis ini menunjukkan bahwa perjalanan menuju pemulihan penuh di Myanmar masih panjang dan rumit.

Merujuk pada penjelasan di atas, penulis melihat adanya urgensi dalam pembahasan tersebut. Penelitian ini akan mencoba memberikan gambaran permasalahan mengenai peranan ASEAN dalam menangani krisis kudeta Myanmar, berdasarkan prinsip ASEAN yaitu tidak boleh ada campur tangan negara lain mengenai permasalahan internal antar sesama negara anggota ASEAN seperti yang terjadi di Myanmar. Penulis akan memberikan penjelasan mengenai pola kerja sama yang dilakukan ASEAN dalam membantu menyelesaikan kudeta militer di Myanmar dengan keterbatasan karena adanya terikat oleh prinsip-prinsip dasar ASEAN.

1.2 Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka peneliti akan membahas pertanyaan penelitian masalah yaitu:

- 1) Bagaimana peran ASEAN dalam merespon kudeta Myanmar tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian peran ASEAN dalam Kudeta Myanmar, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui peran ASEAN dalam merespon kudeta Myanmar Tahun 2021
- 2) Mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi ASEAN dalam merespon kudeta Myanmar Tahun 2021

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun melalui tulisan ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang organisasi regional yaitu ASEAN dalam menanggapi krisis politik di negara anggotanya. Dengan memberikan wawasan tentang dinamika politik dan diplomasi regional.
- 2) Mengevaluasi kebijakan dan tindakan yang diambil oleh ASEAN dalam menanggapi kudeta Myanmar yang dilakukan dengan mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dalam respons regional.
- 3) Membantu mengidentifikasi potensi solusi konflik yang dapat diusulkan oleh ASEAN atau komunitas internasional untuk mengakhiri krisis di Myanmar yang melibatkan pemahaman tentang mediasi dan diplomasi dapat digunakan lebih efektif.
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat internasional tentang situasi di Myanmar dan peran ASEAN dalam menangani krisis tersebut. Dengan demikian, ini dapat memotivasi lebih banyak tindakan kemanusiaan dan advokasi untuk demokrasi dan hak asasi manusia di Myanmar.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, diperlukan penguraian dari struktur penulisan proposal penelitian ini. Proposal penelitian ini mengikuti sistematika yang terdiri dari lima bab yang didukung oleh banyak sub bab yang menjelaskan rinciannya, dan pada akhirnya, semua komponen ini akan

membentuk satu kesatuan yang menjelaskan masalah yang diteliti. Ringkasan umum mengenai struktur keseluruhan bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Penulis memberikan gambaran singkat tentang konteks masalah yang menjadi fokus karya ilmiah ini. Latar belakang masalah yang dibahas adalah pengenalan mengenai pentingnya politik luar negeri dan integrasi ekonomi dalam konteks ASEAN serta peran yang dimainkan oleh Indonesia.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Penulis merinci penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini dan menjelaskan perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu, bab ini juga membahas kerangka pemikiran yang mencakup konsep dan teori yang akan digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian. Konsep dan teori ini merupakan elemen penting dalam pengembangan karya ilmiah yang komprehensif.

BAB III: METODE PENELITIAN

Penulis menjelaskan aspek-aspek metodologi yang digunakan dalam penelitian. Ini mencakup pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, lokasi serta jadwal penelitian, dan aspek, dimensi, serta parameter penelitian. Semua elemen ini merupakan bagian penting dari metodologi penelitian dan digunakan sebagai alat untuk melaksanakan penelitian dengan efektif.

BAB IV: KUDETA MYANMAR TAHUN 2021

Penulis memaparkan dan menjelaskan kondisi gambaran umum Myanmar di masa kudeta Myanmar. Adapun bab ini akan dirinci dalam beberapa subbab untuk menjelaskan fenomena kudeta Myanmar serta Pandemi Covid-19 memiliki implikasi besar di Myanmar, meliputi Stabilitas Keamanan Myanmar (gambaran umum tentang kondisi stabilitas negara Myanmar di masa sebelum kudeta dan masa kudeta tahun 2021), Akar Masalah Kudeta Myanmar Tahun 2021 (Pemaparan tentang penyebab munculnya ketidakpuasan rezim militer, pihak-

pihak terkait dalam melancarkan aksi kudeta Myanmar), Kondisi Sosial-Ekonomi terhadap Kudeta Myanmar (dampak kudeta Myanmar serta pandemi Covid-19 memiliki efek besar terhadap social-ekonomi di Myanmar). Hal ini dijelaskan kronologi pandemi Covid-19 masuk di Myanmar, pengaruh krisis ganda: pengambilalihan militer serta Covid-19 di sektor pendidikan, ekonomi, dan kesehatan); Kondisi Pemerintahan Myanmar (penjelasan tentang kronologi sebelum kudeta hingga kudeta serta sistem pemerintahan yang menggambarkan di masa kudeta tahun 2021), Hegemoni Militer dalam Politik Myanmar (penjelasan secara periodik rezim junta militer berpengaruh besar terhadap politik Myanmar).

BAB V: PERAN ASEAN DALAM MERESPON KUDETA MYANMAR TAHUN 2021

Penulis memaparkan dan menjelaskan Peran ASEAN dalam merespon Kudeta Myanmar Tahun 2021. Adapun bab ini akan dirinci dalam beberapa subbab untuk menjelaskan fenomena Peran ASEAN dalam mengatasi Kudeta Myanmar tahun 2021, meliputi Posisi dan Kekuatan ASEAN sebagai Organisasi Regional (Penjelasan komprehensif tentang ASEAN), Konsensus ASEAN dalam Kudeta Myanmar Tahun 2021 (Proses mekanisme ASEAN terhadap suatu permasalahan regional), Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-39 terhadap Demokratisasi Kudeta Myanmar Tahun 2021, Harmonisasi ASEAN terhadap Krisis Kemanusiaan Masa Kudeta Myanmar Tahun 2021 (bantuan-bantuan kemanusiaan ASEAN di Myanmar), ASEAN Way sebagai Manajemen Konflik terhadap Kudeta Myanmar Tahun 2021 (Proses resolusi konflik ASEAN terhadap kudeta Myanmar).

BAB VI : PENUTUP

Pada Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis pembahasan terhadap bab 4 dan bab 5 bahwasannya fenomena Peran ASEAN dalam mengatasi kudeta Myanmar Tahun 2021 menekankan pada korelasi dari Bab 4 Kudeta Myanmar Tahun 2021 serta Bab 5 Peran ASEAN. Sehingga, hasil penelitian yang didapatkan penulis menjadi temuan-temuan yang menjelaskan fenomena ini.